

Judul : Bangun ekosistem EV, komisi VII harap ada peta jalan terpadu
Tanggal : Jumat, 11 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bangun Ekosistem EV

Komisi VII Harap Ada Peta Jalan Terpadu

ANGGOTA Komisi VII DPR Mohamad Toha meminta Pemerintah memastikan pembangunan ekosistem kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) nasional melalui program Mobil Nasional (Mobnas) maupun Motor Listrik Nasional (Molinas) secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Orientasinya jangan sekadar peningkatan produksi dan penjualan unit.

Dia menyebut, Pemerintah perlu memiliki peta jalan atau *roadmap* yang mengatur seluruh rantai ekosistem kendaraan listrik secara terintegrasi. Mencakup penyediaan bahan baku, teknologi, industri komponen, SDM, produksi, distribusi, pemasaran, purnajual, hingga pengelolaan unit bekas. Kebijakan yang akan jadi pijakan dalam pelaksanaannya kini ditunggu.

Kata Toha, sisi hulu masih menyimpan banyak aspek yang harus dipastikan kesiapannya oleh pemangku kepentingan. "Mencakup kemampuan industri dalam negeri membuat rangka dan komponen, ketersediaan bahan baku, ketergantungan impor, tenaga kerja, penguasaan teknologi, hingga kapasitas

produksi nasional," kata Toha di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memegang posisi sangat strategis dalam pembangunan ekosistem EV nasional. Namun, peran mereka tidak cukup sekadar jadi salah satu pihak yang terlibat di lapangan. Kemenperin perlu berfungsi sebagai regulator kuat yang mengatur keseluruhan rantai industri EV dari hulu ke hilir.

Berikutnya, target utama program Mobnas dan Molinas juga wajib diperjelas Pemerintah secara tegas. Program itu tidak boleh cuma mengejar target produksi dan penjualan, tapi mesti mencakup tujuan industrialisasi luas. Kesiapan hilir seperti pemasaran, pemeliharaan, suku cadang, hingga penanganan unit usang wajib diperhatikan.

Kemudian, sejak awal perancangan program aspek pengelolaan baterai bekas perlu jadi bagian kebijakan Pemerintah. Sistem pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan kembali, serta daur ulang perlu disiapkan secara matang. "Kepastian pemrosesan limbah komponen setelah lima



Mohamad Toha

atau 10 tahun pemakaian kendaraan wajib sudah dipikirkan dengan jelas," ingatnya.

Toha menegaskan, seluruh pentangku kepentingan wajib membangun ekosistem EV nasional wajib dibangun secara utuh. Pemerintah jangan cuma menyiapkan kemampuan produksi, tapi juga wajib siap menangani persoalan yang muncul pascapemakaian masyarakat. Program Mobnas dan Molinas perlu dilihat dalam perspektif mobilitas warga serta pembangunan ekonomi.

Anggota Komisi VII DPR Satori menambahkan, setelah

sebelumnya hanya diminati pecinta otomotif, kini EV semakin dilirik masyarakat luas. Makanya, penggunaannya perlu diikuti kesiapan ekosistem pendukung yang memadai di lapangan. Salah satu yang jadi perhatian utama terkait dengan ketersediaan mekanik andal untuk menangani kendala teknis.

Dia meminta Pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi konkret agar konsumen tidak merasa dirugikan akibat keterbatasan layanan. Kesiapan sarana pendukung dan pelayanan bagi pengguna mulai dimaksimalkan sejak awal. Perlindungan terhadap masyarakat luas perlu dipastikan berjalan secara adil serta merata di seluruh wilayah.

Selanjutnya, standarisasi baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), khususnya roda dua, perlu segera dipersiapkan melalui kepastian regulasi. "Pembahasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib sistem baterai serta harmonisasi aturan swap baterai nasional perlu diperjelas agar memberikan kepastian bagi industri dan pengguna EV," ujarnya.

Sementara, Direktur Jenderal

Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menyatakan, Pemerintah mulai menyiapkan ekosistem Molinas. Program itu mencakup desain, baterai, manufaktur, pengisian daya, hingga distribusi. PT LEN Industri mendapat mandat jadi integrator utama produksi motor listrik dalam negeri.

Dia bilang, pengembangan Molinas wajib mengikuti tahapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan Pemerintah. Produksi motor listrik tidak dibuat terpisah dari kebijakan penguatan industri secara menyeluruh. Target capaian TKDN ditetapkan sebesar 40 persen tahun ini, lalu naik jadi 60 persen tahun depan.

Skala produksi ekosistem yang sedang dibangun memiliki kapasitas cukup besar dalam rantai industri nasional. Kapasitas program Molinas diproyeksikan mampu mencapai 100 ribu unit per tahun. "Total nilai investasi yang terlibat di dalamnya menembus Rp 2,6 triliun lewat kerja sama lintas rantai manufaktur lokal," terangnya. ■ PYB